

# Analisis Status Perkembangan Desa di Kabupaten Karawang. Provinsi Jawa Barat

Analysis of Village Development Status in Karawang regency. West  
Java Province

Laily Noor Lathifah<sup>1</sup>, Ernan Rustiadi<sup>2</sup>, Ivanovich Agusta<sup>3</sup>

Diterima: 10 Agustus 2021

Disetujui: 24 Oktober 2023

**Abstrak:** Kesenjangan dan ketidakmerataan pembangunan menjadi sebuah tantangan bagi daerah-daerah yang sedang berkembang sehingga menentukan pusat-pusat pelayanan menjadi hal yang sangat perlu dilakukan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tingkat status perkembangan desa di Kabupaten Karawang, Provinsi Jawa Barat. Metode yang digunakan untuk menganalisis tingkat status perkembangan kawasan perdesaan adalah Skalogram dengan variabel aksesibilitas dan ketersediaan sarana dan prasarana pendidikan, kesehatan, ekonomi, dan lingkungan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pada hirarki I yang menyebar di 25 perdesaan yang menjadi pusat pertumbuhan dengan kelengkapan aksesibilitas dan jumlah jenis fasilitas memadai. Hirarki II yang menyebar di 83 perdesaan di berbagai kecamatan memiliki jumlah jenis fasilitas dan aksesibilitas yang cukup memadai, dan hirarki III dengan penyebaran di 201 perdesaan yang menjadi daerah terbelakang, dapat di artikan bahwa aksesibilitas yang sulit dan didukung oleh jumlah jenis fasilitas yang masih kurang memadai.

*Kata kunci: Hirarki, Skalogram; Status Perkembangan Desa*

**Abstract:** Development gaps and inequalities become a challenge for developing regions so that determining service centers is a very necessary thing to do. This study aims to determine the level of development status of rural areas in Karawang Regency. West Java province. The method used to analyze the level of development status in rural areas is a Scalogram with the variables of accessibility and availability of facilities and infrastructure. The results of the study show that in hierarchy I, which spreads over 25 villages which are growth centers with complete accessibility and adequate number of types of facilities. Hierarchy II which spreads over 83 villages in various sub-districts has an adequate number of types of facilities and accessibility, and Hierarchy III with distribution in 201 villages which are underdeveloped areas, it can be interpreted that accessibility is difficult and supported by the number of types of facilities that are still lacking.

*Keywords: Hierarchy, Scalogram, Village Developmen Status*

<sup>1</sup> Program Studi Ilmu Perencanaan Pembangunan Wilayah dan Perdesaan, Institut Pertanian Bogor

<sup>2</sup> Program Studi Perencanaan Wilayah, Departemen Ilmu Tanah & Sumberdaya Lahan,  
Institut Pertanian Bogor

<sup>3</sup> Departemen Sains Komunikasi dan Pengembangan Masyarakat, Institut Pertanian Bogor

korespondensi:lnlathifah90@gmail.com

## PENDAHULUAN

Salah satu tujuan pembangunan adalah untuk mengurangi ketimpangan antar wilayah, baik ketimpangan sosial, ekonomi, infrastruktur, pendapatan, dan aspek lainnya. Data empiris menunjukkan bahwa secara nasional masih ada kesenjangan pembangunan antar wilayah perkotaan dengan wilayah perdesaan. Penduduk miskin lebih banyak terdapat di perdesaan dibandingkan perkotaan. Data BPS (2019) menunjukkan bahwa pada tahun 2015 penduduk miskin perdesaan sebesar 14,09%, sementara perkotaan sebesar 8,22%. Demikian juga pada tahun 2018, meskipun sama-sama mengalami penurunan. Namun penduduk miskin perdesaan (13,10%) masih lebih tinggi dibandingkan perkotaan (6,89%). Wilayah yang didominasi pedesaan tingkat kemiskinan cenderung lebih tinggi dibandingkan dengan wilayah yang didominasi perkotaan. Untuk mengurangi tingkat kesenjangan yang semakin melebar, pemerintah mengembangkan program-program khusus pembangunan desa dan perdesaan sehingga diharapkan dapat terjadi konvergensi pertumbuhan antara wilayah perdesaan dan perkotaan

Upaya untuk melakukan modernisasi dan penguatan ekonomi perdesaan adalah melalui dukung penyediaan infrastruktur perdesaan seperti jalan, listrik, air bersih, dan prasarana kegiatan ekonomi lainnya. Prakteknya, selama ini melaksanakan proses pembangunan perdesaan belum berhasil mencapai tujuan tersebut, disisi lain bahkan menimbulkan berbagai permasalahan baru berupa kesenjangan kota dan desa yaitu perbedaan tingkat kesenjangan yang menyolok antara perdesaan dan perkotaan (Kurnia dalam Diartho, 2017). Pernyataan lain menyebutkan bahwa kesenjangan antara sektor industri dan sektor pertanian tampak pada kesenjangan kota dan desa (Mubyarto dalam Diartho, 2017). Kesenjangan fenomena perbedaan antar wilayah yang disebabkan oleh ketidakmerataan pembangunan antar wilayah dan salah satu cara yang dapat dilakukan dalam mengatasi kesenjangan yaitu dengan mengoptimalkan pusat-pusat pelayanan (Muliana *et al*, 2018). Pradhan (2003) menyatakan bahwa pembangunan perdesaan hanya dapat berkesinambungan apabila fasilitas sarana dan prasarana yang tersedia dapat menstimulasi dan mendorong kegiatan produksi dan pasar di wilayah perdesaan.

Kabupaten Karawang merupakan wilayah yang didominasi oleh perdesaan. Pemerintah menetapkan Kabupaten Karawang sebagai lumbung padi nasional utama ke 3. Karawang memiliki luas 175.327 ha (Dinas Pertanian Tanaman Pangan, 2017), dan 87.000 ha telah dicadangkan sebagai lahan pangan pertanian berkelanjutan (LP2B) (BPN, 2018). Kabupaten Karawang juga merupakan salah satu kawasan industri yang menjadi daerah penopang industri bagi Ibukota Jakarta dan Bekasi yang padat industri. Kementerian Pertanian juga menunjuk Kabupaten Karawang menjadi salah satu kabupaten penyangga pangan Ibukota. Sebagai daerah penopang industri, menjadikan Kabupaten Karawang sebagai tujuan utama para penanam modal baik dalam maupun luar negeri. Investasi dari dalam dan luar negeri pada tahun 2015 Kabupaten Karawang memperoleh Rp25,454 Trilyun jumlah ini mengalami penurunan dari tahun sebelumnya yang mampu memperoleh Rp25,722 Trilyun (RPJMD Kabupaten Karawang, 2019). Hal ini dikarenakan investasi yang ada di Kabupaten Karawang belum dapat menyerap tenaga kerja lokal. Tahun 2015 hanya mampu menyerap tenaga kerja lokal sebesar 34.008 orang dibandingkan tahun sebelumnya yang mampu menyerap hingga 70.714 orang. Pembangunan kawasan perdesaan dilaksanakan dalam upaya mempercepat dan meningkatkan kualitas pelayanan, pembangunan, dan pemberdayaan masyarakat desa di kawasan perdesaan melalui pendekatan pembangunan partisipatif. Pembangunan kawasan perdesaan meliputi: (a) Penggunaan dan pemanfaatan wilayah desa dalam rangka penetapan kawasan pembangunan sesuai dengan tata ruang kabupaten/kota. (b) Pelayanan yang dilakukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat perdesaan. (c) Pembangunan infrastruktur, peningkatan ekonomi perdesaan, dan pengembangan teknologi tepat guna, dan (d)

Pemberdayaan masyarakat desa untuk meningkatkan akses terhadap pelayanan dan kegiatan ekonomi (Undang-Undang Desa Nomor 16 Tahun 2014 Pasal 83). Penduduk miskin relatif lebih banyak ditemukan di perdesaan, terutama desa yang berstatus tertinggal.

Kabupaten Karawang terdiri dari 30 kecamatan, 12 kelurahan, dan 297 desa. Berdasarkan data Indeks Desa Membangun (IDM) Kabupaten Karawang Tahun 2018, dari jumlah tersebut 35 desa (11,78%) masuk kategori desa tertinggal yang tersebar di kecamatan Cilebar, Cimalaya Wetan, Majalaya, Pedes, Rengasdengklok, Banyusari, Kutawaluya, Telukjambe Barat, Ciampel, dan Cibuaya. Pembangunan di beberapa desa tertinggal tersebut memerlukan strategi khusus, agar dapat mengejar ketertinggalannya, menjadi sejajar dengan desa lainnya di Kabupaten Karawang yang sudah masuk kategori desa maju. Harefa dalam Budiarto (2017) permasalahan kesenjangan pembangunan masih didominasi pada permasalahan kemiskinan, pendidikan, dan kesehatan, serta rendahnya akses masyarakat perdesaan, wilayah terpencil, perbatasan dan wilayah tertinggal terhadap sarana dan prasarana ekonomi. Tujuan penelitian ini adalah mengidentifikasi status perkembangan desa di Kabupaten Karawang Provinsi Jawa Barat, dengan harapan agar tingkat keberhasilan dalam pencapaian sasaran pembangunan akan lebih tinggi dan tujuan pembangunan menjadi lebih fokus karena majunya suatu desa tidak terlepas dari adanya pembangunan fasilitas fisik, seperti fasilitas ekonomi, fasilitas sosial, serta fasilitas lainnya yang dapat mendukung kegiatan ekonomi (Todaro & Smith, 2011).

Penelitian ini berfokus untuk melihat perkembangan desa terhadap aksesibilitas desa dan jumlah fasilitas fisik (fasilitas pendidikan, kesehatan, ekonomi, dan lingkungan) yang menyebar di masing-masing desa di Kabupaten Karawang. Ketersediaan data jumlah fasilitas lain yang tidak dimiliki oleh Kabupaten Karawang menjadi kendala dalam melakukan penelitian ini.

## METODE

Penelitian ini dilakukan pada bulan Januari-Desember 2020. Penelitian ini menggunakan data sekunder. Data sekunder adalah pengumpulan data melalui studi pustaka yang diperoleh dari instansi pemerintahan yang terkait dengan penelitian pengembangan perdesaan yaitu (1) BPS; (2) Potensi Desa (Podes) tahun 2019 Kabupaten Karawang; (3) Institusi-institusi lainnya. Data Podes Tahun 2019 yang dipergunakan meliputi aksesibilitas, jumlah fasilitas pendidikan, fasilitas kesehatan, fasilitas ekonomi, fasilitas sosial, dan fasilitas lingkungan.

## Analisis Status Perkembangan Desa

Analisis status perkembangan desa dilakukan dengan menggunakan metode Skalogram berbobot atau Skalogram termodifikasi. Pengolahan data menggunakan metode Skalogram berbobot di asumsikan bahwa jumlah hasil bobot yang di dapat pada setiap fasilitas tidak sama. Bobot yang dipergunakan adalah rasio jumlah total fasilitas dengan jumlah unit wilayah yang dimiliki fasilitas tersebut. Analisis dengan teknik skalogram menjadi salah satu teknik untuk dapat memetakan hirarki wilayah, yang mana sebagai pusat-pusat pelayanan dalam mendukung pelayanan aktivitas wilayah. Tahapan-tahapan dalam penyusunan skalogram adalah (1) tahap awal mempersiapkan data dan menyusunnya dengan format tabel, dengan urutan pada kolom paling kiri adalah no urut, nama wilayah (kabupaten/kota atau kecamatan atau desa/Kelurahan), jumlah penduduk, diikuti dengan aksesibilitas dan unit fasilitas suatu wilayah; (2) menyusun *invers* untuk variabel yang menandakan aksesibilitas terhadap fasilitas, maksud menyusun *invers* dari jarak terhadap fasilitas adalah untuk mendapatkan nilai dari *invers* jarak yang berkorelasi positif terhadap fasilitas lainnya; (3) seluruh nilai distandarisasikan sehingga memiliki nilai

satuan yang sama; (4) menjumlahkan data seluruh jumlah total wilayah, aksesibilitas dan unit fasilitas secara horizontal untuk menentukan indeks perkembangan desa; (5) menjumlahkan masing-masing unit fasilitas secara vertikal sehingga memperoleh jumlah total unit fasilitas yang tersebar pada suatu wilayah, kemudian ditentukan rata-rata unit fasilitas, simpangan baku, total terisi (sehingga fasilitas dengan nilai nol tidak akan terhitung), bobot (rasio antara total terisi dengan jumlah wilayah), kemudian hitung pula nilai maksimum dan nilai minimum; (6) menentukan kelas hirarki suatu wilayah, penentuan tersebut didapat dari indeks baku yang terlebih dahulu diperoleh dari parameter-parameter rata-rata dan standar deviasi.

Analisis status perkembangan desa adalah suatu tolak ukur yang dibuat untuk memperoleh nilai bagaimana tingkat perubahan atau perkembangan kawasan perdesaan di Kabupaten Karawang dengan menggunakan unit analisisnya adalah desa. Pengukuran status perkembangan kawasan perdesaan ini dibangun atas ketersediaan hasil data Potensi Desa (PODES) tahun 2018 dan digunakan sebagai rujukan dalam menyusun indikator-indikator status perkembangan kawasan perdesaan. Terdapat 39 indikator fasilitas yang digunakan sebagai bahan analisis. Variabel tersebut adalah aksesibilitas dan fasilitas yang berkaitan dengan kegiatan sosial, ekonomi, dan pemeliharaan lingkungan. Fasilitas kesehatan (rumah sakit, puskesmas, polindes, tempat praktek dokter, poliklinik, dan apotek). Fasilitas pendidikan yaitu TK-RA-PAUD, SD, SMP, SMA, perguruan tinggi, dan pesantren). Fasilitas ekonomi yaitu keberadaan pasar, supermarket, KUD, dan bank. Fasilitas sosial yaitu kelembagaan masyarakat desa. Fasilitas pemeliharaan lingkungan adalah sarana/prasarana penanggulangan bencana serta, sarana/prasarana sanitasi dan air bersih.

Secara teoritis, hierarki wilayah sebenarnya ditentukan oleh tingkat kapasitas pelayanan wilayah secara totalitas yang tidak terbatas ditunjukkan oleh kapasitas infrastruktur fisiknya saja tetapi juga kapasitas kelembagaan, sumberdaya manusia, serta kapasitas-kapasitas perekonomiannya (Rustiadi, 2011). Model linier untuk menentukan nilai indeks perkembangan suatu wilayah/pusat pelayanan yang dikombinasikan dengan metode skalogram adalah:

$$IP_j = \sum_i^n I'_{ij}$$

Dimana:

$$I'_{ij} = \frac{I_{ij} - I_{i \min}}{SD_i}$$

Keterangan:

$IP_j$  = Indeks perkembangan wilayah ke-j

$I_{ij}$  = Nilai (skor) indeks perkembangan fasilitas ke-i wilayah ke-j

$I'_{ij}$  = Nilai (skor) indikator perkembangan fasilitas ke-i terkoreksi (terstandarisasi) wilayah ke-j

$I_{i \min}$  = Nilai (skor) indikator perkembangan fasilitas ke-i terkecil (minimum)

$SD_i$  = Standar deviasi indeks perkembangan fasilitas ke-i.

**Tabel 1. Variabel dan Parameter yang Digunakan pada Metode Skalogram**

No.	Variabel	Parameter
1.	Aksesibilitas	Jarak desa ke ibukota kecamatan (Km) Waktu tempuh dari desa ke ibukota kecamatan (menit) Jarak terdekat menuju jenjang pendidikan TK/RA/BA (km) Jarak terdekat menuju jenjang pendidikan SMU/MA (km) Jarak terdekat menuju jenjang pendidikan SMK (km) Jarak terdekat menuju jenjang pendidikan PT (km) Jarak terdekat menuju Rumah Sakit (km) Jarak terdekat menuju Puskesmas dengan rawat inap (km) Jarak terdekat menuju Poliklinik/balai pengobatan (km) Jarak terdekat menuju praktek dokter (km) Jarak terdekat menuju apotek (km) Jika tidak ada kelompok pertokoan jarak ke sarana dan prasarana ekonomi terdekat: ..... km Jika tidak ada pasar dengan bangunan permanen jarak ke sarana dan prasarana ekonomi terdekat: ..... km Jika tidak ada minimarket/swalayan jarak ke sarana dan prasarana ekonomi terdekat: .... Km Jika tidak ada restoran/rumah makan jarak ke sarana dan prasarana ekonomi terdekat: ..... km Waktu tempuh dari desa ke ibukota kecamatan (menit)
2.	Fasilitas pendidikan	Jumlah TK, RA, PAUD (Unit) Jumlah SD (unit) Jumlah SMP (unit) Jumlah SMA (unit) Jumlah Perguruan Tinggi (unit) Jumlah Pondok Pesantren (unit)
3.	Fasilitas kesehatan	Jumlah Rumah sakit (unit) Jumlah puskesmas (unit) Jumlah polindes (unit) Jumlah Posyandu (unit) Jumlah Poliklinik/Balai Pengobatan (unit) Jumlah Tempat Praktek Dokter (unit) Jumlah Apotek (unit)
4.	Fasilitas ekonomi	Jumlah Super market/pasar swalayan/toserba/mini market (unit) Jumlah Bank (unit) Jumlah Koperasi (unit) Jumlah BUMDes (unit) Jumlah pasar tradisional (unit)
5.	Fasilitas sosial	Jumlah lembaga kemasyarakatan desa (unit)

Nilai indeks perkembangan desa disusun berdasarkan urutan hirarki mulai dari nilai tertinggi sampai terendah, sehingga terlihat hasil dari analisis hirarki wilayah yang kemudian akan di ketahui status perkembangan wilayah di kabupaten karawang. Dengan asumsi penetapan hirarki mengikuti sebaran normal adalah:

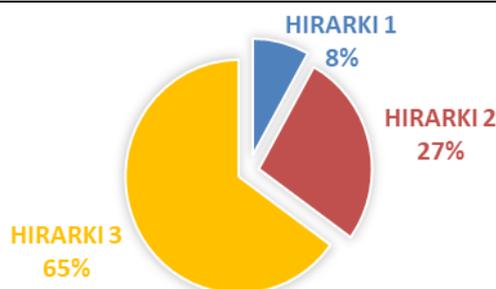
1. Wilayah hirarki I: status perkembangan tinggi yaitu nilai wilayah yang jumlah indeks bakunya lebih besar dari pada nilai rataan ditambah dengan standar deviasi atau indeks perkembangan wilayah > (StDev + Average).
2. Wilayah hirarki II: wilayah dengan nilai indeks hirarki sama dengan nilai rataan indeksnya. (indeks perkembangan desa >Average)
3. Wilayah III: wilayah dengan nilai indeks hirarki kurang dari nilai rataan indeks diseluruh wilayah. (indeks perkembangan wilayah < Average).

**Tabel 2. Penentuan nilai selang hirarki**

No.	Kelas	Nilai selang	Tingkat hirarki
1.	Hirarki I	$\Sigma Kij \geq \text{rataaan} + \text{StDev} (Kij)$	Tinggi
2.	Hirarki II	$\text{Rataan} \leq \Sigma Kij \leq \text{rataaan} + \text{StDev}$	Sedang
3.	Hirarki III	$\Sigma Kij \leq \text{rataaan}$	Rendah

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan hasil perhitungan analisis status perkembangan desa di Kabupaten Karawang menggunakan metode skalogram maka didapatkan bahwa perkembangan fisik yang baik berada pada desa-desa yang menjadi hirarki I berstatus perkembangannya tinggi sebanyak 8% desa-desa di Kabupaten Karawang. Hirarki II status perkembangan sedang sebanyak 27% desa-desa di Kabupaten Karawang, dan hirarki III status perkembangan rendah (terbelakang) sebanyak 65% desa-desa di Kabupaten Karawang, hal ini dapat dilihat pada Gambar 1. Dalam analisis ini perhitungan kelayakan analisis skalogram dilakukan interpretasi data pada jumlah fasilitas, yang mana setiap angka 1 menunjukkan bahwa tiap kecamatan memiliki fasilitas/infrastruktur, sedangkan setiap angka 0 menunjukkan bahwa tiap kecamatan tidak ada yang memiliki fasilitas/infrastruktur.



Sumber: Data Diolah, 2020

**Gambar 1. Persentase Kelompok Hirarki I, II, dan III**

Hirarki I yang menggambarkan desa-desa di Kabupaten Karawang memiliki kelengkapan tertinggi dan baik terhadap aksesibilitas dan jumlah jenis fasilitas fisik menjadikan hirarki I pada desa-desa di Kabupaten Karawang berpotensi sebagai pusat pelayanan di Kabupaten Karawang. Wilayah dengan fasilitas lebih lengkap dan baik berada pada wilayah dengan aksesibilitas yang tinggi (Apriana & Rudiarto, 2020). Hirarki I mempunyai kekuatan menarik paling besar karena fasilitas pelayanan yang disediakan wilayah ini sangat banyak dan lengkap. Perbedaan dalam memiliki fasilitas pelayanan publik antar desa menimbulkan pengaruh yang besar terhadap daya tarik wilayah tersebut untuk menjadi pusat pertumbuhan (Ancok & Nurhadi, 2018). Hasil ini didukung oleh penelitian yang dilakukan Gulo (2015) yang menyatakan bahwa semakin lengkap fasilitas ekonomi dan sosial maka semakin menarik bagi masyarakat untuk melakukan aktivitas di wilayah ini. Kemudian penelitian Apriana & Rudiarto (2020) yang menyatakan pula bahwa pada wilayah yang memiliki potensi untuk berkembang dikarenakan semakin banyak dan lengkap fasilitas pada di suatu wilayah dapat menjadi tolak-ukur perkembangan wilayah (Shara, 2018). Kawasan hirarki I memiliki kelengkapan jumlah jenis fasilitas antara skor 10-50 jenis fasilitas.

Desa-desa hirarki I terbanyak ada di posisi Kecamatan Cilamaya Kulon dan Kecamatan Cibuyaya. Lebih lengkapnya dapat dilihat pada Tabel 3. Kecamatan Cilamaya

Kulon adalah pemekaran dari Kecamatan Cilamaya dengan luas desa 63,32 Km<sup>2</sup>. Posisi yang berbatasan dengan laut Jawa di sebelah utara, sebelah barat berbatasan dengan Kecamatan Tempuran dan Kecamatan Lemahabang, sebelah timur berbatasan dengan Kecamatan Cilamaya Wetan, dan sebelah selatan berbatasan dengan Kecamatan Banyusari. Kecamatan Cimalaya Kulon dengan fasilitas pelayanan fisik yang memadai dan posisinya yang berdekatan dengan laut Jawa menjadikan Kecamatan Cimalaya Kulon (Desa Bayurkidul) memiliki potensi produk unggulan perikanan yang di salurkan melalui program pemberdayaan masyarakat dalam pengawasan dan pengendalian sumberdaya kelautan produk unggulan berupa pengolahan hasil perikanan adalah ikan asin, ikan pindang; terasi, *mini plan* (rajungan), kerupuk, dan terumbu karang.

**Tabel 3. Desa dan Kecamatan yang Berada di Hirarki I pada Perkembangan Kawasan Perdesaan di Kabupaten Karawang**

No.	Kecamatan	Desa/Keluarahan	Keterangan
1.	Pangkalan	Medalsari	Hirarki I
2.	Ciampel	Tegalega	Hirarki I
3.	Ciampel	Mulyasejati	Hirarki I
4.	Jatisari	Sukamekar	Hirarki I
5.	Banyusari	Kutaraharja	Hirarki I
6.	Cilamaya Kulon	Kiara	Hirarki I
7.	Cilamaya Kulon	Bayur Kidul	Hirarki I
8.	Cilamaya Kulon	Bayur Lor	Hirarki I
9.	Cilamaya Kulon	Langensari	Hirarki I
10.	Cilamaya Kulon	Sukamulya	Hirarki I
11.	Cilamaya Kulon	Pasirukem	Hirarki I
12.	Cilamaya Kulon	Sukajaya	Hirarki I
13.	Cilamaya Kulon	Pasirjaya	Hirarki I
14.	Cilamaya Kulon	Muktijaya	Hirarki I
15.	Cilamaya Kulon	Tegalurung	Hirarki I
16.	Cilamaya Kulon	Manggungjaya	Hirarki I
17.	Cilamaya Kulon	Sumurgede	Hirarki I
18.	Cibuaya	Sukasari	Hirarki I
19.	Cibuaya	Cibuaya	Hirarki I
20.	Cibuaya	Pejaten	Hirarki I
21.	Cibuaya	Kalidungjaya	Hirarki I
22.	Cibuaya	Kedungjaya	Hirarki I
23.	Cibuaya	Jayamulya	Hirarki I
24.	Cibuaya	Cemarajaya	Hirarki I
25.	Cibuaya	Sedari	Hirarki I

*Sumber: Data Diolah, 2020*

Kecamatan Cibuaya yang berposisi berbatasan dengan laut Jawa di utara, sebelah barat berbatasan dengan Kecamatan Pedes, sebelah timur berbatasan dengan Kecamatan Jayakarta, dan sebelah selatan berbatasan dengan Kecamatan Tirtajaya. Kecamatan Cibuaya selain bersatatus perkembangan desa tinggi dan fasilitas fisik yang memadai, Kecamatan Cibuaya menjadi salah satu kawasan hutan mangrove dengan status kawasan hutan lindung yang telah di tetapkan oleh Menteri Kehutanan hal ini karena Kecamatan Cibuaya yang berdekatan dengan laut dan berpotensi terjadi bencana banjir.

Hirarki II adalah desa yang memiliki jumlah dan kelengkapan jenis fasilitas yang menengah. Kelengkapan jumlah jenis fasilitas pada hirarki II adalah diantara 10 samapai 50 jenis fasilitas. Hirarki II berjumlah 83 desa (27% perdesaan di Kabupaten Karawang).

Sebaran Hirarki II terbanyak terdapat pada Kecamatan Banyusari, kecamatan Pakisjaya, Kecamatan Batujaya, dan Kecamatan Tempuran dan dapat dilihat pada Tabel 4.

Kecamatan Banyusari merupakan pemekaran dari Kecamatan Jatisari, Kecamatan Banyusari yang berada di sebelah timur dari pemerintahan Kabuapten Karawang. Disebelah utara berbatasan dengan Kecamatan Cilamaya Wetan dan Cilamaya Kulon, sebelah barat berbatasan dengan Kecamatan Lemahabang dan Kecamatan Tirtamulya, sebelah selatan berbatasan dengan Kecamatan Jatisari dan sebelah timur berbatasan dengan Kabupaten Subang. Secara geografis berada di dataran rendah dengan ketinggian rata-rata 13-14 Meter dari permukaan air laut. Jarak dari kecamatan Banyusari ke ibu kota kabupaten kurang lebih  $\pm 50$  Kilometer dengan posisi kantor Kecamatan Banyusari berada di Desa Gembongan. Aksesibilitas yang menghubungkan Kecamatan Banyusari adalah jalan kolektor dimana jalan ini merupakan penghubung menuju jalur utama, sehingga kecamatan ini mudah dalam mencapai pelayanan pendidikan, dan ekonomi. Masyarakat Kecamatan Banyusari mayoritas bekerja pada bidang pertanian, perkebunan, kehutanan dan perikanan, namun adapula pekerja pada bidang industri dan jasa. Pertanian tanaman pangan memiliki kontribusi sangat besar bagi perekonomian masyarakat di Kecamatan Banyusari, terlihat dari luas tanah sawah 38,14% yang hampir 80.19% dari luas wilayahnya membuat Kecamatan Banyusari mampu memproduksi padi sawah yang seluruhnya menggunakan teknis irigasi dengan luas tanam 5.820 hektar sehingga hal ini menjadi primadona perekonomian masyarakatnya. Selain pertanian padi sawah sebagai warga besar lainnya bekerja di sektor perdagangan, seperti ada beberapa desa yang menjadi sentra pengolah ikan pindang yaitu Desa Cicinde Selatan dan Desa Jayamukti. Kecamatan Banyusari memiliki sarana dan prasarana yang masih kurang memadai, contohnya sarana prasarana pendidikan dan kesehatan, menjadikan masyarakat tidak mampu untuk mengikuti anjuran pemerintah terkait wajib belajar selama 9 tahun, dan fasilitas kesehatan yang belum dirasakan oleh masyarakat di akibatkan belum terjadinya peningkatan kesejahteraan warganya.

Kecamatan Pakisjaya merupakan pemekaran dari kecamatan Batujaya, berbatasan dengan laut jawa di sebelah utara, Sungai Citarum dan Kabupaten Bekasi di sebelah Barat, di sebelah selatan dan sebelah timur berbatasan dengan Kecamatan Batujaya. Posisi kecamatan yang paling ujung di Kabupaten Karawang berdekatan dengan Laut Jawa membuat Kecamatan Pakisjaya mayoritas merupakan pekerja dibidang perikanan dan pertanian padi sawah, namun adapula pekerja di bidang perdagangan dan jasa. Kecamatan Pakisjaya yang sangat jauh dari pusat perkotaan ini membuat Kecamatan Pakisjaya terdapat aksesibilitas yang kurang baik (jalan yang rusak dan berlubang) dan infrastruktur lainnya. Kecamatan Pakisjaya memiliki potensi wisata pantai laut yang baik melihat posisi daerahnya yang berdekatan dengan laut hal ini membuat para wisatawan berdatangan, terutama pada waktu-waktu atau musim-musim liburan banyaknya masyarakat yang datang untuk berkunjung baik dari dalam kota ataupun dari luar kota, hanya untuk sekedar berkunjung lalu pulang ataupun menginap. Pantai tersebut adalah Pantai Tanjung Pakis, pantai yang berada di salah satu desa Kecamatan Pakisjaya yaitu desa Tanjungpakis, dengan luas kurang lebih  $\pm 80$  kilometer dari pusat kota Kabupaten Karawang. Pantai ini memiliki hamparan pasir putih, garis pantai yang sangat luas, dan ombak yang tidak terlalu besar membuat daya tarik tersendiri bagi para wisatawan untuk berkunjung. Hal inipun dimanfaatkan oleh para nelayan tangkap untuk menjualkan ikan segarnya kepada para wisatawan, baik ikan laut, ikan asap, dan ikan asin tersedia di sini.

**Tabel 4. Desa dan Kecamatan yang Berada di Hirarki II pada Perkembangan Kawasan Perdesaan di Kabupaten Karawang**

No.	Kecamatan	Desa/Kelurahan	Keterangan
1.	Pangkalan	Mulangsari	Hirarki II
2.	Pangkalan	Tamansari	Hirarki II
3.	Pangkalan	Tamanmekar	Hirarki II
4.	Tegalwaru	Cigunungsari	Hirarki II
5.	Tegawaru	Mekarbuana	Hirarki II
6.	Tegalwaru	Cintalaksana	Hirarki II
7.	Tegalwaru	Kutamaneuh	Hirarki II
8.	Tegalwaru	Kutalanggeng	Hirarki II
9.	Ciampel	Kutanegara	Hirarki II
10.	Telukjambe Barat	Mulyajaya	Hirarki II
11.	Telukjambe Barat	Mekarmulya	Hirarki II
12.	Telukjambe Barat	Parungsari	Hirarki II
13.	Cikampek	Kalihurip	Hirarki II
14.	Tirtamulya	Kertawaluya	Hirarki II
15.	Jatisari	Telarsari	Hirarki II
16.	Jatisari	Pacing	Hirarki II
17.	Banyusari	Pamekaran	Hirarki II
18.	Banyusari	Cicinde Selatan	Hirarki II
19.	Banyusari	Jayamukti	Hirarki II
20.	Banyusari	Gempolkot	Hirarki II
21.	Banyusari	Gembongan	Hirarki II
22.	Banyusari	Mekarasih	Hirarki II
23.	Banyusari	Banyuasih	Hirarki II
24.	Banyusari	Talunjaya	Hirarki II
25.	Banyusari	Tanjung	Hirarki II
26.	Cilamaya Wetan	Sukakerta	Hirarki II
27.	Cilamaya Wetan	Rawagempol Kulon	Hirarki II
28.	Cilamaya Wetan	Muarabaru	Hirarki II
29.	Cilamaya Wetan	Muara	Hirarki II
30.	Lemahabang	Pulokelapa	Hirarki II
31.	Lemahabang	Lemahmukti	Hirarki II
32.	Lemahabang	Pulomulya	Hirarki II
33.	Talagasari	Linggarsari	Hirarki II
34.	Talagasari	Pulosari	Hirarki II
35.	Talagasari	Ciwulan	Hirarki II
36.	Talagasari	Kalijaya	Hirarki II
37.	Talagasari	Kalisari	Hirarki II
38.	Rawamerta	Cibadak	Hirarki II
39.	Rawamerta	Sekarwangi	Hirarki II
40.	Rawamerta	Sukaraja	Hirarki II
41.	Tempuran	Lemahkarya	Hirarki II
42.	Tempuran	Lemahduhur	Hirarki II
43.	Tempuran	Lemahsubur	Hirarki II
44.	Tempuran	Lemahmakmur	Hirarki II
45.	Tempuran	Jayanagara	Hirarki II
46.	Tempuran	Ciparagejaya	Hirarki II
47.	Kutawaluya	Sindangkarya	Hirarki II
48.	Kutawaluya	Sindangmukti	Hirarki II
49.	Kutawaluya	Waluya	Hirarki II
50.	Kutawaluya	Sindangsari	Hirarki II
51.	Kutawaluya	Kutaraja	Hirarki II
52.	Rengasdengklok	Dukuhkarya	Hirarki II
53.	Jyakerta	Jyamakmur	Hirarki II
54.	Jyakerta	Jyakerta	Hirarki II
55.	Jyakerta	Kampung sawah	Hirarki II
56.	Pedes	Malangsari	Hirarki II
57.	Pedes	Dongkal	Hirarki II
58.	Cilebar	Sukaratu	Hirarki II

No.	Kecamatan	Desa/Kelurahan	Keterangan
59.	Cilebar	Mekarpohaci	Hirarki II
60.	Cilebar	Cikande	Hirarki II
61.	Cilebar	Rawasari	Hirarki II
62.	Cilebar	Pusakajaya Selatan	Hirarki II
63.	Cilebar	Pusakajaya Utara	Hirarki II
64.	Cibuaya	Kedungjeruk	Hirarki II
65.	Cibuaya	Gebangjaya	Hirarki II
66.	Tirtajaya	Medankarya	Hirarki II
67.	Tirtajaya	Gempolkarya	Hirarki II
68.	Tirtajaya	Srikamulyan	Hirarki II
69.	Tirtajaya	Tambaksari	Hirarki II
70.	Batujaya	Kutaampel	Hirarki II
71.	Batujaya	Karyamakmur	Hirarki II
72.	Batujaya	Telukbango	Hirarki II
73.	Batujaya	Baturaden	Hirarki II
74.	Batujaya	Segaran	Hirarki II
75.	Batujaya	Segarjaya	Hirarki II
76.	Pakisjaya	Telagajaya	Hirarki II
77.	Pakisjaya	Telukbuyung	Hirarki II
78.	Pakisjaya	Tanahbaru	Hirarki II
79.	Pakisjaya	Solokan	Hirarki II
80.	Pakisjaya	Tanjungbungin	Hirarki II
81.	Pakisjaya	Tanjungmekar	Hirarki II
82.	Pakisjaya	Tanjungpakis	Hirarki II
83.	Pakisjaya	Telukjaya	Hirarki II

Sumber: Data Diolah 2020

Hirarki II lainnya ada pada Kecamatan Batujaya berada di sebelah utara Kabupaten Karawang dengan batas wilayah sebelah utara adalah Kecamatan Tirtajaya dan Laut Jawa, sebelah barat adalah Kecamatan Pakisjaya, sebelah selatan adalah Kabupaten Bekasi, dan sebelah timur adalah Kecamatan Jayakarta dan Kecamatan Tirtajaya. Bentuk tanah di Kecamatan Batujaya merupakan daerah dataran dengan ketinggian wilayah kecamatannya  $\pm 10\text{m}$  dari permukaan laut. Terdapat satu desa yang berbatasan langsung dengan laut (pesisir) adalah Desa Segarjaya. Kecamatan batujaya merupakan menghasil padi terbaik sebanyak 65.924 ton pernah didapatkan, adapula hasil peternakan dengan penghasil terbanyak adalah domba sebanyak 3.303 ekor, dan adapula ayam pedaging sebanyak 151.800 ekor. Melihat hasil pertanian dan peternakan yang diperoleh maka perekonomian pada Kecamatan Batujaya dapat dikatakan memiliki fondasi ekonomi yang baik, memiliki sumberdaya dan energi yang unggul, sehingga memiliki skala ekonomi yang besar terhadap perkembangan desa-desanya. Berdasarkan keberadaan wilayah Kecamatan Batujaya yang berdekatan dengann Kota Bekasi memudahkan dalam menjangkau aksesibilitas dan fasilitas-fasilitas lainnya.

Kecamatan Tempuran merupakan sebaran terbanyak pada hirarki II. Posisi Kecamatan Tempuran berada di sebelah timur laut kota Kabupaten Karawang dan berada di daerah pantai. Batas wilayah Kecamatan Tempuran adalah ke utara Laut Jawa, ke selatan Kecamatan Telagasari dan Kecamatan Lemah Abang, ke Barat Kecamatan Cilebar dan Kecamatan Rawamerta, ke Timur Kecamatan Cilamaya Kulon. Hasil potensi yang dimiliki oleh Kecamatan Tempuran adalah pertanian padi sawah, namun adapula perikanan tangkap yang ditangkap dari laut dan sungai, perikanan budidaya yang diperoleh dari area luas tambak/empang air payau yang miliki oleh masyarakat, peternakan, perdagangan, dan lain-lainnya. Menurut Kecamatan Tempuran fasilitas pendidikan menjadi faktor penting dalam menentukan kemajuan daerahnya dan negara oleh sebab itu pemerintah menaikkan anggaran untuk pendidikan agar anak-anak mereka dapat bersekolah dan demi mensejahterakan para guru-guru. Selain itu fasilitas kesehatan juga terus ditingkatkan demi memenuhi kebutuhan mendasar bagi seluruh warga.

Hirarki III adalah hirarki yang menggambarkan suatu wilayah yang memiliki jumlah dan jenis fasilitas terendah. Salah satu ciri daerah yang tumbuh cepat yaitu tingginya kesejahteraan masyarakat yang dimiliki oleh suatu wilayah akan terus meningkat (Rahayu & Budi dalam Anisah, 2018). Desa-desanya yang terdapat pada hirarki III memiliki jumlah jenis fasilitas fisik yang kurang dari 10-45 jenis fasilitas fisik dalam arti masih kurangnya ketersediaan fasilitas sosial, ekonomi, dan pemeliharaan lingkungan. Pada umumnya sebaran hirarki III terbanyak terdapat pada (1) Kecamatan Cikampek, (2) Kecamatan Cimalaya Wetan, (3) Kecamatan Jatisari, (4) Kecamatan Klari, (5) Kecamatan Kotabaru, (6) Kecamatan Lemahabang, (7) Kecamatan Pedes, (8) Kecamatan Purwasari, (9) Kecamatan Rawamerta, (10) Kecamatan Rengasdengklok, (11) Kecamatan Talagasari, (11) Kecamatan Telukjambe Timur, dan (12) Kecamatan Tirtamulya.

Hirarki III berjumlah 201 desa dan keberadaan Hierarki III adalah 1). Desa Cicinde utara, Gempol, Pamekaran, Cicinde selatan, Jayamukti, Gempolkolot, Gembongan, Mekarasih, Banyuasih, Talunjaya, Tanjung, dan Kutaraharja berada di Kecamatan Banyusari, 2). Desa Telukambulu, Batujaya, Karyamulya, Karyabakti, Kutaampel, Karyamakmur, Telukbango, Baturaden, Segaran, dan Segarjaya berada di Kecamatan Batujaya, 3). Desa Tegalega, Mulyasejati, Mulyasari, Kutanegara, Kutapohaci, Kutamekar, dan Parungmulya berada di Kecamatan Ciampel, 4). Desa Kertarahayu, Sukasari, Cibuaya, Pejaten, Kedungjeruk, Kalidungjaya, Kedungjaya, Jayamulya, Gebangjaya, Cemarajaya, Sedari berada di Kecamatan Cibuaya, 5). Desa Kalihurip, Cikampek Timur, Dawuan Timur, Cikampek Kota, Dawuan Tengah, Cikampek Pusaka, Cikampek Barat, Dawuan Barat, Kamojing, Cikampek Selatan berada di Kecamatan Cikampek, 6). Desa Kiara, Bayur Kidul, Bayur Lor, Langensari, Sukamulya, Pasirukem, Sukajaya, Pasirjaya, Muktijaya, Tegalurung, Manggungjaya, Sumurgede berada di Kecamatan Cimalaya Kulon, 7). Desa Cikarang, Rawagempol Wetan, Sukatani, Tegalwaru, Cilamaya, Sukakerta, Rawagempol Kulon, Tegalsari, Muarabaru, Muara, Cicalong Mekarmaya berada di Kecamatan Cimalaya Wetan, 8). Desa Tanjungsari, Kosambibatu, Ciptamargi, Kertamukti berada di Kecamatan Cilebar, 9). Desa Cikalongsari, Barugbug, Kalijati, Mekarsari, Jatiragas, Situdam, Jatibaru, Jatisari, Jatiwangi, Balonggandu, Cirejag berada di Kecamatan Jatisari, 10). Desa Makmurjaya, Kemiri, Kertajaya, Ciptamarga, Medangasem berada di Kecamatan Jayakarta, 11). Desa Tanjungpura, Tanjungmekar, Karangpawitan, Mekarjati, Karawang Kulon, Adiarsa Barat, Nagasari, dan Tunggakjati berada di Kecamatan Karawang Barat, 12). Desa Palawad, Adiarsa Timur, Warungbambu, Margasari, Tegalsawah, Karawang Wetan, Palumbonsari, dan Kondangjaya berada di Kecamatan Karawang Timur, 13). Desa Cimahi, Gintungkerta, Walahar, Anggadita, Karanganyar, Klari, Pancawati, Duren, Sumurkondang, Cibalongsari, Belendung, Curug, dan Kiarapayung berada di Kecamatan Klari, 14). Desa Jomin Barat, Cikampek Utara, Sarimulya, Pangulah Baru, Pangulah Selatan, Wancimekar, Pucung, Pangulah Utara, dan Jomin Timur berada di Kecamatan Kotabaru, 15). Desa Mulyajaya, Kutajaya, Kutakarya, Kutagandok, Kutamukti, Sindangmulya, dan Sampalan berada di Kecamatan Kutawaluya, 16). Desa Karangtanjung, Kedawung, Pasirtanjung, Waringinkarya, Karyamukti, Pulojaya, Lemahabang, Ciwaringin berada di Kecamatan Lemahabang, 17). Desa Pasirjengkol, Lemahmulya, Majalaya, Bengle, Pasirmulya, Ciranggon, dan Sarijaya berada di Kecamatan Majalaya, 18). Desa Ciptasari, Kertasari, Cintaasih, dan Jatilaksana berada di Kecamatan Pakisjaya, 19). Desa Kertamulya, Karangjaya, Puspasari, Kedaljaya, Randumulya, Labanjaya, Sungaibuntu, Payungsari, Jatimulya, Kertaraharja berada di Kecamatan Pangkalan, 20). Desa Tamelang, Tegalsari, Mekarjaya, Darawolong, Cengkong, Sukasari, Karangsari, dan Purwasari berada di Kecamatan Purwasari, 21). Desa Gombongsari, Balongsari, Pasirawi, Panyingkiran, Sukapura, Pasirkaliki, Kutawargi, Mekarjaya, Sukamerta, dan Purwamekar berada di Kecamatan Rawamerta, 22). Desa Rengasdengklok Selatan, Kertasari, Karyasari, Kalangsuria, Rengasdengklok Utara, Amansari, Kalangsari, dan Dewisari berada di

Kecamatan Rengasdengklok, 23). Desa Cadaskertajaya, Cariumulya, Pasirkamuning, Talagamulya, Talagasari, Kalibuaya, Pasirtalaga, Pasirmukti, dan Cilewo berada di Kecamatan Talagasari, 24). Desa Wargasetra, Citalanggeng, Cipurwasari, dan Cintawargi berada di Kecamatan Tegalwaru, 25). Desa Karangmulya, Wanakerta, Wanasari, Margamulya, Margakaya, Wanajaya, Karangligar berada di Kecamatan Telukjambe Barat, 26). Desa Sukaharja, Puseurjaya, Sirnabaya, Purwadana, Sukamakmur, Pinayungan, Telukjambe, Wadas, dan Sukaluyu berada di Kecamatan Telukjambe Timur, 27). Desa Purwajaya, Sumberjaya, Cikuntul, Pancakarya, Pagadungan, Dayeuhluhur, Tempuran, dan Tanjungjaya berada di Kecamatan Tempuran, 28). Desa Tambaksumur, Sabajaya, Kutamakmur, Srijaya, Bolang, Sumurlaban, dan Pisangsambo berada di Kecamatan Tirtajaya, 29). Desa Parakan, Cipondoh, Kamurang, Karangjaya, Bojongsari, Karangsinom, Citarik, Tirtasari, dan Parakanmulya berada Di Kecamatan Tirtamulya.

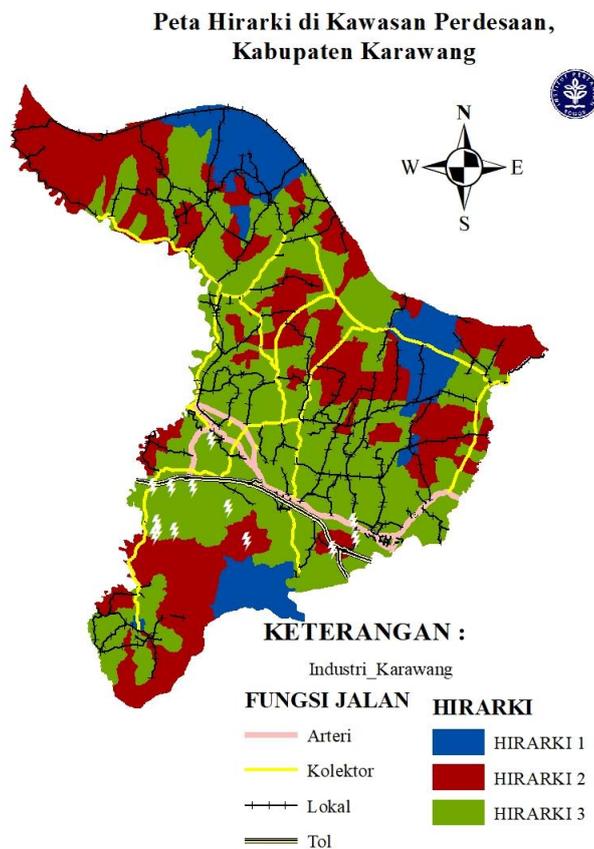
**Tabel 5. Nilai Indeks Perkembangan Kawasan Perdesaan di Kabupaten Karawang**

Uraian	Nilai Indeks Perkembangan Desa
Hirarki 1	33,71 - 130,49
Hirarki 2	17,88 - 33,43
Hirarki 3	1,00 - 17,23
Nilai Minimal	1
Nilai Maksimal	130,49
Nilai Rata-rata	17,23
Nilai Standar Deviasi	16,29

*Sumber: Data Olah Skalogram 2020*

Diharapkan dengan pemetaan hirarki yang tepat maka penentuan pusat-pusat pelayanan di dalam lingkup suatu sistem wilayah menjadi lebih tepat (Pribadi et al., 2006) Berdasarkan Tabel 5 hasil analisis skalogram bahwa nilai indeks perkembangan desa pada masing-masing kategori hirarki di kawasan perdesaan di Kabupaten Karawang memiliki nilai dengan nilai maksimal 130,49; nilai minimum 1,00 dengan nilai rata-rata 17,23; dan nilai standar deviasi 16,29. Nilai maksimal adalah nilai yang perolehan indeks perkembangan desa paling besar yang dapat menentukan hirarki I, nilai minimal perolehan indeks perkembangan desa yang dapat menentukan hirarki III (terendah) dan, nilai rata-rata perolehan indeks perkembangan desa antara hirarki I, hirarki II, dan hirarki III.

Gambar 2 memperlihatkan peta sebaran hirarki perkembangan kawasan perdesaan di Kabupaten Karawang. Desa-desa yang masuk kategori hirarki I dijelaskan dengan warna biru, dengan posisi sebaran pada masing-masing desa sebanyak 25 desa, kemudian desa-desa yang masuk hirarki II dijelaskan dengan warna merah, dengan sebaran masing-masing desa sebanyak 83 desa, dan desa-desa yang masuk hirarki III dijelaskan dengan warna hijau, dengan masing-masing sebaran sebanyak 201 desa.



Sumber: Pemetaan ARGIS Olah Data, 2020

**Gambar 2. Peta Sebaran Hirarki I, II, dan III di Kabupaten Karawang, Jawa Barat**

Jaringan jalan adalah salah satu prasarana angkutan jalan yang merupakan komponen penting dalam menunjang pertumbuhan ekonomi suatu daerah atau kawasan sebab 70% pergerakan lalu lintas angkutan orang dan barang dilakukan di jalan (Priyambodo, 2012). Gambar 2 memperlihatkan adanya fungsi-fungsi jalan yang mengelilingi kawasan perdesaan di Kabupaten Karawang yaitu. (1) Jalan arteri (utama), jalan ini ditunjukkan dengan garis lurus berwarna pink yang berada pada bagian selatan Kabupaten Karawang. Jalan ini melalui sebagian wilayah hirarki I, hirarki II, dan hirarki III, hal ini disebabkan karena pada wilayah tersebut terdapat kawasan industri seperti Mandalapratama Permai Industrial Estate, Karawang International Industrial City, Kawasan Industri GT Tech Park. Jalan ini juga dipergunakan sebagai keluar dan masuknya truk-truk industri, selain itu jalan dengan transportasi bus antar kota antar provinsi, dan fasilitas ekonomi lainnya; (2) Jalan kolektor. Jalan ini ditunjukkan dengan garis lurus berwarna kuning yang mengelilingi sebagian kawasan perdesaan di Kabupaten Karawang. Jalan ini dilalui oleh wilayah hirarki I, hirarki II, dan hirarki III. Keberadaan jalan ini dipergunakan masyarakat untuk bisa mencapai kelengkapan dalam berbagai fasilitas yang tersedia pada pelayanan berskala kabupaten; (3) Jalan lokal (jalan antar lingkungan), jalan tersebut ditunjukkan dengan garis bergerigi berwarna hitam yang hampir terdapat pada kawasan perdesaan di Kabupaten Karawang; (4) tol (jalan bebas hambatan), jalan ini ditunjukkan dengan garis dua lurus bergradasi warna kuning yang hanya terdapat sebagian selatan kawasan perdesaan di Kabupaten Karawang. Berdasarkan Gambar 2 bahwa terdapat beberapa desa-desa yang belum dihubungkan oleh akses jalan kolektor dan jalan

lokal, dan kondisi jalan-jalan yang kurang bagus mengakibatkan masyarakat sulit mencapai tujuan pusat-pusat fasilitas pelayanan fisik sehingga dirasa kesejahteraan masyarakat belum tercapai. Akses jalan darat menjadi satu-satunya penghubung antara desa-desa satu dengan desa-desa lainnya, baik untuk kegiatan perekonomian ataupun kegiatan sosial. Sumadi et al. (2017) menyatakan bahwa ketersediaan infrastruktur dan sistem jaringan dalam suatu wilayah mempengaruhi perkembangan wilayah tersebut.

Pemerataan pembangunan yang memiliki peran vital dalam perkembangan wilayah seperti fasilitas pendidikan, fasilitas perdagangan, dan fasilitas perindustrian di kecamatan yang memiliki nilai perkembangan rendah. Hirarki III adalah desa-desa yang terletak pada area sepanjang jalan jalur transportasi darat antar kota satu dengan kota lainnya. Desa-desa tersebut termasuk desa yang dilalui secara langsung oleh jalur transportasi maupun desa diluarnya, tetapi masih terpengaruh pada keberadaan jalur tersebut oleh sebab itu penyebab perkembangan wilayah pada hirarki III berbeda yaitu keberadaan akses transportasi jalan yang menjadikan desa ini memiliki potensi untuk berkembang lebih cepat. Potensi ekonomi yang dikembangkan sangat tergantung kepada potensi lokal dan rencana pengembangan wilayah seperti kawasan industri, perdagangan, pergudangan, kawasan permukiman dan lainnya karena desa-desa tersebut menjadi penghubung ekonomi antar kota dan desa.

## KESIMPULAN

Status perkembangan desa di Kabupaten Karawang pada hirarki I adalah daerah yang memiliki pusat ketersediaan sarana dan prasarana pelayanan yang memadai serta kemudahan dalam mencapai aksesibilitas, pada hirarki I sebaran terbanyak berada di Kecamatan Cimalaya Kulon dan Kecamatan Cibuya. Sebaran hirarki III terbanyak berada di Kecamatan Jatisari, Kecamatan Klari, Kecamatan Pedes, dan Kecamatan Rawamerta. Hirarki III merupakan daerah-daerah terbelakang dengan ketersediaan sarana dan prasarana pelayanan yang dimiliki masih relatif kurang memadai dari hirarki I dan hirarki II. Wilayah yang masuk hirarki III adalah wilayah dengan perkembangan desa yang masih sulit untuk mencapai sarana fasilitas yang mencukupi.

Saran yang dapat direkomendasikan adalah perlu adanya penelitian lanjutan terkait perkembangan perdesaan di Kabupaten Karawang, dikarenakan Kabupaten Karawang merupakan salah satu yang menjadi kawasan industri dengan upah pekerja tertinggi di Jawa Barat dan juga lumbung padi nasional tetapi peningkatan kesejahteraan masyarakat masih kurang hal ini dapat diperbaharui dengan data yang terbaru. Adapun perkembangan desa yang menggunakan indeks pembangunan desa (IPD) dapat pula membandingkan dengan indeks desa membangun (IDM) agar dalam mengukur pengembangan data wilayah menjadi lebih komprehensif.

## DAFTAR PUSTAKA

- Apriana, M., & Rudiarto, I. 2020. Penentuan Pusat Pelayanan Perkotaan di Kota Tanjungpinang. *Tunas Geografi*, 9(1), 1-12.
- Anisah, A., Soedwihjono, S., & Miladan, N. (2018). Analisis Perkembangan Wilayah Kecamatan Kartasura Sebagai Kawasan Strategis Cepat Tumbuh. *Jurnal Tata Loka*, 20(4), 486.
- Ancok, Z. W., & Nurhadi, N. 2018. Kajian Pengembangan Pusat Pertumbuhan Wilayah di Kabupaten Klaten. *Geomedia: Majalah Ilmiah dan Informasi Kegeografian*, 16(1).
- [BPS] Badan Pusat Statistik. 2019. Kabupaten Karawang dalam Angka 2019. Karawang (ID): BPS
- Budiarto, T. 2017. Kajian Tipologi Desa Berdasarkan Status Perkembangan dan Kemandirian Desa (Studi Kasus Kabupaten Bogor, Propinsi Jawa Barat). [Tesis]: Sekolah Pasca Sarjana Institut Pertanian Bogor
- Diarto, H. C., 2017. Perencanaan Pengembangan Kawasan Perdesaan Berbasis Potensi di Kabupaten Bondowoso. *Jurnal Ekuilibrium*, 1(1), pp.1-9.
- Gulo, Y. 2015. Identification of Growth and Hinterland Area in Developing Nias District. *Widyariset*, 18(1), 37-48.

- Todaro M. P, Smith S. C. 2011. Pembangunan Ekonomi. Edisi Kesebelas. Jakarta (ID). Erlangga
- Pribadi, D. O., Rustiadi, E., Panuju, D. R., Pravitasari, A. E. 2006. Permodelan Perencanaan Pengembangan Wilayah (Konsep, Metode, Aplikasi, dan Teknik Komputasi). P4W IPB. Bogor
- Rustiadi, E. 2011. Perencanaan Dan Pengembangan Wilayah. Jakarta (ID). Yayasan Pustaka Obor Indonesia
- Muliana, R., Astuti, P. and Fadli, A., 2018. Kajian Pusat-Pusat Pelayanan di Kabupaten Kampar. *Jurnal Saintis*, 18(1), pp.59-72
- Shara, A. R. I. D. 2018. Analisis Konektivitas Wilayah di Kota Denpasar. *Media Komunikasi Geografi*, 19(1), 42.
- Sumadi, S. H. T., Papia, F. J. and Makainas, I. 2017. Hubungan Aksesibilitas Terhadap Tingkat Perkembangan Wilayah Kecamatan di Kota Tomohon. *Spasial*, 4(1), pp.149-158.